

**EVALUASI PROGRAM KERJA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
PANTAI PASIR PUTIH MAELANG
(Suatu Studi Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Di Kabupaten Bolaang
Mongondow)**

*Regina Sari Bagit¹
Sarah Sambiran²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Program pengembangan pariwisata merupakan program yang sarasannya mengarah pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur budaya dan pariwisata. Program tersebut merupakan program pemerintah daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya program yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow dilihat dari hak kepemilikan yang telah dibuat pembebasan lahan dari pemerintah desa ke pemerintah Daerah, sarana pendukung yang menjadi faktor utama dalam mengelola obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow diantaranya penataan ulang pelataran parkir bagi para pengunjung/wisatawan, pembangunan dan perbaikan gazebo, toilet. Berbicara tentang fasilitas pendukung dalam konteks pengelolaan obyek wisata sangatlah penting karena fasilitas pariwisata merupakan inventaris nyata dan menjadikan suatu nilai investasi setiap bulannya mengalami peningkatan selain itu dampak lain terhadap masyarakat dapat meningkatkan penghasilan yang diperoleh setiap minggunya akan meningkat dari hasil kebun yang mereka jajakan.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, Pengembangan Pariwisata.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Sektor pariwisata menjadi industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi pemerintahan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang otonomi daerah, pariwisata juga telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara. Pariwisata sebagai suatu sektor industri, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi dan telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa maupun lapangan kerja. Sektor pariwisata juga membawa dampak sosial, ekonomi, maupun dalam konteks pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sumber daya

alam, dan budaya yang semakin arif dan bijaksana. Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar yang membentang dan tersebar di lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang devisa tersebar kedua setelah migas, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan pemerintah kedepan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Sebagai Negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat serta agama, tidak terkecuali Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara yang merupakan sebuah daerah di bagian timur Indonesia dengan potensi alam yang luar biasa dan budaya yang sangat kental.

Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki spot pariwisata yang tidak kalah dengan kabupaten lainnya di provinsi Sulawesi Utara, kabupaten Bolaang Mongondow sebagai destinasi wisata yang memiliki tempat-tempat yang dapat dinikmati keindahannya baik wisata alam, budaya, sejarah, seni dan lainnya. Sektor pariwisata sesungguhnya merupakan sektor yang sangat potensial dan mempunyai prospek pengembangan, namun sektor tersebut belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, baik dari pemerintah

maupun masyarakat. Hal tersebut dapat diamati dari adanya berbagai potensi wisata, baik wisata budaya maupun wisata alam yang belum “disentuh” atau dikembangkan. Padahal sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Program pengembangan pariwisata merupakan program yang sasarannya mengarah pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur budaya dan pariwisata. Program tersebut merupakan program pemerintah daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2012-2017. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata, perlu dilakukan pemantauan atau evaluasi untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan program dalam pembangunan kepariwisataan. Evaluasi dapat memberikan informasi tidak hanya mengenai perkembangan input dan output pelaksanaan program, tetapi juga meliputi hasil, manfaat dan dampak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan potensi pariwisata. Evaluasi dapat dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program untuk mengukur indikator-indikator, yaitu; menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai, menentukan apakah terdapat manfaat dari program dan menentukan suksesan keseluruhan pelaksanaan program.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional (pasal 1) menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Maka dengan demikian, seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memiliki peran dalam pengembangan pariwisata memberikan perhatian yang lebih terhadap pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan.

Pelaksanaan Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata didasarkan pada potensi yang dimiliki kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow memang memiliki daya tarik wisata yang unik, peninggalan budaya memberikan warna dan makna tersendiri bagi siapa saja yang mengunjungi daerah ini. Penduduk yang ramah, budaya yang asli dan lestari menjadikan Bolaang Mongondow menjadi potensi daerah tujuan wisata Sulawesi Utara. dan bahkan masyarakat agar kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow lebih terawat dan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai tempat wisata.

Meskipun Bolaang Mongondow memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Ada banyak permasalahan yang ditemui, dimana keberadaan/letak dari objek wisata tidak diketahui wisatawan. Sebagian besar area wisata jauh dan bahkan tidak terjangkau dari akses transportasi, sehingga sulit

dijangkau oleh wisatawan luar. Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai daerah agraris membutuhkan sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang aktivitas masyarakat dan juga wisatawan dari luar. Sarana dan prasarana yang ada belum mampu menjangkau seluruh pelosok desa dan kualitasnya pun masih rendah. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Bolaang Mongondow dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat. Jalan yang merupakan prasarana utama di daerah ini dalam memperlancar kegiatan perekonomian di semua sektor dipandang masih sangat perlu untuk ditingkatkan.

Hasil pengamatan awal diperoleh informasi bahwa sebagian besar objek pariwisata tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah karena di lihat dari pogram kerja untuk pariwisata sangat minim sekali terutama untuk jalan akses menuju tempat pariwisata pasir putih maelang harus di perbaiki sehingga bisa mendatangkan wisatawan asing ataupun lokal untuk datang berkunjung ke Kabupaten Bolaang Mongondow, hal ini kemudian membuat masyarakat kurang mempedulikannya, bahkan tidak mendukung. Juga belum adanya tourism center untuk mempermudah wisatawan mengetahui tentang pariwisata di daerah tersebut. Disamping itu sistem pemasaran yang kurang luas atau bahkan tidak tepat sasaran. Tidak hanya hal tersebut yang menjadi masalah, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) yang mengelola kurang berkompeten dalam masalah pariwisata. Pada kenyataannya belum diketahui dengan jelas apakah Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak

positif, apakah pencapaian tujuan dan sasaran program telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Tinjauan Pustaka

Sangat perlu untuk menentukan bagaimana program-program yang sesungguhnya berjalan, untuk mengukur hasil kondisi-kondisi pelaksanaan dan menyelidiki apakah program dilaksanakan sesuai dengan apa yang di inginkan dan apabila tidak, berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaiki. Penyelidikan yang diperlukan ini disebut suatu evaluasi. Evaluasi dalam penggunaannya yang paling umum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai (*value*). Evaluasi dianggap sebagai cara untuk menerapkan secara sistematis ide pengujian eksperimental atas pilhan kebijakan dalam lingkungan yang terkontrol (Frank 2015). Kebutuhan dan tuntutan akan pertanggungjawaban menimbulkan suatu kebutuhan dilakukannya evaluasi. Pertanggung jawaban tidak terbatas pada suatu aktivitas, akan tetapi juga untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perkembangan masyarakat. Menurut Wirawan (2012) evaluasi adalah: "Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi."

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu lama. Secara umum, program adalah

suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan suatu sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi di dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Sedangkan evaluator adalah orang yang melakukan evaluasi. Banyak kriteria, jenis atau model evaluasi yang dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program. Evert Vedung (dalam Wirawan 2012:9) mengemukakan empat kriteria dalam evaluasi program sebagai berikut:

- a. Efektif
- b. Produktivitas
- c. Efisiensi (cost-benefit)
- d. Efisiensi (cost-effectiveness)

Pengembangan sektor pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta dapat memberikan manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan mengembangkan sektor pariwisata juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama dari segi pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh 3 faktor (Yoeti, 1996), sebagai berikut :

1. Tersedianya objek dan daya tarik wisata.

2. Adanya fasilitas dan aksesibilitas yaitu sarana dan prasarana, sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.
3. Terjadinya fasilitas amenities yaitu sasaran kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

PP Nomor 50 Tahun 2011 memuat visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh 4 (empat) strategi pembangunan kepariwisataan, yang meliputi destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai; pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab; industri pariwisata yang berdaya saing; dan organisasi pemerintah, Pemda, swasta dan masyarakat yang efektif dalam mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang Evaluasi Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Maelang di Kabupaten Bolaang Mongondow ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran ataupun penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi, bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat. Ini akan memberikan gambaran kenyataan dari kejadian yang diteliti atau dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau

menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga sekedar untuk mengungkap fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Nawawi Hadari, 2007). Sedangkan dasar penelitiannya adalah studi kasus.

Untuk menjelaskan arah dari penelitian ini, maka akan diberikan gambaran penguraian variabel dan indikator penelitian. Adapun fokus penelitian mengenai Evaluasi Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu berdasarkan teori dari Subarsono (2006) mencakup lima kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas.
2. Kecukupan.
3. Pemerataan.
4. Responsivitas.
5. Ketepatan.

Penelitian mengenai Evaluasi Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data dan informasi yang akurat, serta informan yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata
3. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bolaang Mongondow

4. Tokoh Masyarakat
5. Wisatawan

Hasil Penelitian

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan pencapaian sasaran/target yang telah ditentukan. Dalam tujuan Pembebasan dan pencabutan hak atas tanah adalah dua acara dalam manahak atas tanah dari yang empunya menjadi dihapus, dan karena itu tanah yang dihakinya menjadi tanah negara bebas kemudian atas permohonan sesuatu pihak hak atas tanah itu diberikan oleh negara kepadanya. "Baik pencabutan maupun pembebasan hak atas tanah dilakukan apabila cara lain untuk memindahkan hak (jual-beli, tukarmenukar) tidak mungkin dilakukan, sedangkan si pihak yang memerlukan tanah atas pertimbangannya dan disetujui oleh instansi yang berwenang sangat memerlukan tanah tertentu.

Kepariwisataan dikembangkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi mempunyai tujuan yang luas meliputi aspek sosial-budaya, politik dan hankamnas. Walaupun demikian tujuan ekonomis sangat menonjol, lagi pula aspek non ekonomis pembangunan pariwisata sangat erat terkait dengan tujuan ekonominya. Secara spesifik pengembangan pariwisata diharapkan

dapat memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta mendorong pembangunan daerah. Sektor pariwisata juga diharapkan sebagai lokomotif (penggerak) dan magnet (pemicu) dalam memperbaiki kondisi ekonomi.

Waktu pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan dalam satu periode yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, program penataan dan pengelolaan obyek wisata dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan Sosialisasi, Musdes sosialisasi, tahapan verifikasi, tahapan penanggulangan dan penyelesaian korban akibat ganti rugi pembebasan tanah/lahan. Pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan melalui beberapa proses yaitu:

- a. Sosialisasi dimana pada tahapan ini dilakukan pengenalan awal pada masyarakat di sekitar lahan obyek wisata agar memahami adanya program penataan dan pengelolaan obyek wisata yang telah dicanamkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Sosialisasi ini memakan waktu selama 2 hari.
- b. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi sebagai ajang penyebarluasan informasi mengenai adanya program penataan dan pengelolaan obyek wisata, tahapan ini memerlukan waktu 2 hari.
- c. Verifikasi yaitu adalah tahapan untuk menilai kelayakan usulan setiap warga masyarakat yang berada disekitar obyek wisata tentang yang harus ditambahkan penda setempat agar

dapat membantu kelancaran program penataan dan pengelolaan obyek wisata yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan tahapan waktu 3 hari.

- d. Tahapan penanggulangan dan penyelesaian korban akibat ganti rugi tanah/lahan yaitu untuk menghindari adanya keributan/konflik antar warga dan penda setempat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, waktu pelaksanaan tahapan ini memakan waktu 3 bulan. Adapun tahapan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai penyebab terjadinya korban akibat ganti rugi tanah/lahan dan penanggulangannya.

Dari beberapa hasil wawancara dari para informan maka dapat disimpulkan bahwa, waktu pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow cukup efektif meskipun masih terdapat beberapa masalah-masalah teknis yang terjadi dilapangan masalah tersebut diantaranya, dalam hal pembebasan lahan/tanah yang ada di obyek wisata Pantai Pasir Putih Maelang masyarakatnya belum paham betul tentang program yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat sehingga terjadi keterlambatan pembebasan lahan/tanah yang ada di obyek wisata bahari. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow menyiasati dengan cara melaksanakan tahapan yang telah di uraikan sebelumnya diantaranya mengusahakan pemahaman masalah dan mengusahakan pencegahan struktural agar program yang telah di laksanakan dapat tercapai secara maksimal selama kurun waktu yang telah ditentukan.

Efektivitas pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata dapat di lihat juga dari sejauh mana pelaksanaan program mini mencapai sasaran atau tujuannya. Apabila suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan efektif, namun sebaliknya apabila suatu program tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya maka program tersebut tidak efektif. Sasaran dari pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata ini adalah untuk membebaskan lahan obyek wisata alam dan bahari, pembangunan kolam renang yang di bagi menjadi dua bagian yaitu anak-anak dan dewasa, pembangunan dan penataan ulang gasibu (pondok) yang telah rusak, toilet, Penataan pelataran parkir.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran program penataan dan pengelolaan obyek wisata Pantai Maelang di Kabupaten Bolaang Mongondow ini dapat dilihat dari apakah kegiatan penataan dan pengelolaan ini telah mencapai sasaran pembangunan yang telah ditentukan dan apakah sudah terlaksana dengan baik atau malah sebaliknya dan dapat dilihat juga dari apakah masing-masing pembangunan tersebut mengalami perubahan serta apakah hal tersebut dapat bermanfaat nantinya bagi para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow atau tidak.

Kecukupan dan pemerataan program pariwisata yang ada di Pantai Maelang Kabupaten Bolaang Mongondow, melalui program yang akan dilaksanakan oleh dinas pariwisata, perlu dilakukan integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu manajemen untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat setempat yang ada

disekitar obyek wisata. Dalam penelitian ini integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap tingkat kemampuan aparatur untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow. Untuk mengukur keberhasilan dalam proses sosialisasi dapat diukur atau dilihat dari bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada masyarakat dan seberapa jauh masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi yang didapat dari sosialisasi tersebut apakah mereka memahami/mengerti atau bahkan sebaliknya.

Untuk membahas lebih lanjut bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola yang terkait dalam pelaksanaan Promosi mengenai pendukung obyek wisata Pantai Maelang di Kabupaten Bolaang Mongondow yakni sebagai berikut proses sosialisasi dalam penelitian ini adalah proses pengenalan promosi pariwisata dalam usaha adanya pendukung/pendorong yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mewujudkan sektor pariwisata Bolaang Mongondow dapat berkembang dan bersaing dengan tempat wisata yang ada di Indonesia serta berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana untuk melakukan proses sosialisasi mengenai program, yaitu terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana program,

Proses penyampaian informasi atau sosialisasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana program ini menyangkut keterkaitan antara

keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga pelaksana tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan program yang bersangkutan. Adapun hal yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai pendukung obyek wisata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya petunjuk-petunjuk/pedoman-pedoman dari Pemerintah. Dengan adanya petunjuk/pedoman dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga pembangunan dan pengembangan penataan dan pengelolaan pariwisata dari beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, karena didorong oleh perkembangan teknologi perhubungan serta adanya promosi yang dilaksanakan/digalakkan oleh pemerintah melalui promosi/publitas pariwisata. Dan yang lebih penting lagi karena Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri memiliki daya tarik sebagai daerah tujuan wisata dengan mempunyai keunikan tersendiri dari budaya dan masyarakatnya. Dari keseluruhan ini terlaksana dengan baik berkat adanya petunjuk-petunjuk/pedoman dari pemerintah untuk mengembangkan penataan obyek wisata dan pengelolaannya dan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Daerah Bolaang Mongondow.
- b. Promosi dan pusat informasi pariwisata. Promosi pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yaitu

mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai primadona Daerah Tujuan Wisata di Sulawesi Utara, sesungguhnya baru dilakukan secara berencana dan terarah dalam beberapa tahun terakhir ini. Penggalakan promosi dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dengan pihak Swasta pengelola usaha pariwisata utamanya dalam bidang Biro Perjalanan Umum. Sebagai dampak positif dari kegiatan promosi dan publitas pariwisata tersebut maka arus wisatawan ke Kabupaten Bolaang Mongondow secara perlahan dan kedepannya nanti tetap meyakinkan akan bertambah terus. Mengalirnya wisatawan baik mancanegara maupun nusantara ke Daerah Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan dapat membantu Penghasilan Asli Daerah (PAD) ke depannya.

Adapun kegiatan promosi dan publitas pariwisata sebagai pendorong/pendukung program penataan dan pengelolaan obyek wisata yang dilakukan adalah:

- a. Bekerja sama dengan pihak swasta yaitu kepada semua pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata menerbitkan bahan promosi dan publitas pariwisata berupa brosur, leaflet, dan booklet.
- b. Bekerja sama dengan pakar budaya Bolaang Mongondow menerbitkan buku tentang makna dan sejarah dari Kota Bolaang Mongondow.
- c. Memanfaatkan pekan budaya Bolaang Mongondow untuk mempromosikan pariwisata.
- d. Bekerja sama dengan pemerintah dengan pengelola obyek untuk pengadaan telepon umum setiap

obyek wisata yang belum terjangkau dengan sinyal telepon seluler.

- e. Banyaknya jenis dan jumlah obyek wisata yang bisa dikembangkan untuk menarik para wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta yaitu kepada semua pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata menerbitkan bahan promosi dan publisitas pariwisata berupa sosialisasi, brosur, leaflet, dan booklet serta tata cara pelaksanaan program dituangkan dalam pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh pemda setempat. Selain proses sosialisasi dari pembuat kebijakan dengan pelaksana program seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dari pelaksana program kepada target group atau masyarakat khususnya masyarakat yang ada disekitar obyek wisata kabupaten Bolaang Mongondow. Agar anggota masyarakat yang dimaksud mengerti tentang sasaran ataupun manfaat dari program tersebut. Adapun pada program promosi dan publisitas mengenai isi dan tujuan dari program ini kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada disekitar obyek wisata, dilakukan melalui proses sosialisasi.

Dapat diketahui bahwa sosialisasi atau proses penyampaian informasi dari pelaksana ke masyarakat khususnya masyarakat yang ada disekitar obyek wisata Bolaang Mongondow yaitu melalui sosialisasi dengan berbagai media seperti, brosur, leaflet, dan booklet, bahkan sosialisasi langsung kemasyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang memperlihatkan pengetahuan masyarakat akan adanya

program ini di Kabupaten Bolaang Mongondow maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat program tersebut dari pelaksana kepada masyarakat belum berjalan dengan optimal.

Responsivitas program pariwisata melalui pengembangan obyek wisata pantai maelang dapat dikaji melalui proses adaptasi dimana proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu/masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur pembangunan sarana sanitasi sekitar obyek wisata dengan mengadakan pembangunan pasar agribisnis ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar obyek wisata untuk dapat meningkatkan penghasilan tambahan diantaranya berupa penjualan hasil perkebunan mereka kepada para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tersebut. Dalam penelitian ini adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan melakukan pembangunan sarana prasarana sekitar Obyek Wisata Pantai Maelang.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai salah satu Kabupaten yang mulai berusaha menggali sumber-sumber pariwisata, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satu sector yang potensial untuk dikembangkan adalah sektor pariwisata. Peningkatan pendapatan di sektor pariwisata berjalan melalui kunjungan wisatawan ke obyek wisata sehingga memberikan sumbangan retribusi obyek wisata dan nantinya akan memberikan sumbangan/pemasukan bagi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow itu sendiri. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan posisi yang lebih baik untuk pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka pelaksanaan pembangunan, sehingga dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan anggaran pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pariwisata adalah perjalanan menuju daerah yang memiliki potensi alam dan terasosiasi dengan sosial kultur masyarakat di suatu daerah. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam, juga menikmati keindahan budaya lokal yang ada. Keindahan alam dan budaya yang ditawarkan juga menimbulkan dampak kepada lingkungan, baik dampak ekonomi, sosial, budaya atau fisik, baik dampak positif ataupun negatif. Pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan dan arah pengelolaan yang jelas agar semua potensi yang dimiliki dapat diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bolaang Mongondow sebagai salah satu daerah yang menjadi tujuan pariwisata masih sangat perlu untuk dibenahi. Pemerintah masih belum optimal untuk mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai daerah pariwisata yang baik karena masih banyak infrastruktur yang seharusnya dibenahi dengan baik. Sarana dan prasarana pendukung juga masih sangat minim, Tourism Center sebagai pusat informasi pariwisata belum ada di Bolaang Mongondow.

Kesimpulan

1. Tidak berjalannya program yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten

Bolaang Mongondow dilihat dari hak kepemilikan yang telah dibuat pembebasan lahan dari pemerintah desa ke pemerintah Daerah

2. Sarana pendukung yang menjadi faktor utama dalam mengelola obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow diantaranya penataan ulang pelataran parkir bagi para pengunjung/wisatawan, pembangunan dan perbaikan gazebo, toilet. Berbicara tentang fasilitas pendukung dalam konteks pengelolaan obyek wisata sangatlah penting karena fasilitas pariwisata merupakan inventaris nyata dan menjadikan suatu nilai investasi setiap bulannya mengalami peningkatan selain itu dampak lain terhadap masyarakat dapat meningkatkan penghasilan yang diperoleh setiap minggunya akan meningkat dari hasil kebun yang mereka jajakan.
3. Belum terlaksananya program pemeliharaan dan pelestarian yang maksimal serta fasilitas yang memadai seperti, akses jalan ke objek wisata yang kurang mendukung, tidak terpusatnya informasi, dan kurangnya publikasi mengenai objek wisata sehingga para wisatawan harus aktif mencari info sendiri lewat masyarakat atau penyedia jasa seperti hotel dan cafe.

Saran

1. Lebih ditingkatkan lagi dalam kinerja pelaksanaan program dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow dilokasi objek wisata Pantai Pasir Putih dilihat dari hak kepemilikan yang sudah dilakukan pembebasan lahan.
2. Disarankan kepada warga masyarakat yang berada dilahan obyek wisata pantai maelang turut

membantu Pemerintah Daerah setempat untuk lebih paham dan mengerti tentang maksud dan tujuan Pemerintah Daerah untuk membangun daerah Bolaang Mongondow sebagai daerah wisata.

3. Agar sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kepariwisataan terutama pada obyek wisata pasir putih maelang lebih ditingkatkan mutu dan kualitasnya agar para wisatawan yang berkunjung merasa nyaman dan lebih menikmati pemandangan alam yang telah tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Abdul Jabar. 2010. Evaluasi Program Pendidikan; Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Djuju, Sdjuna. 2006. Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah; Untuk Pendidikan Non Formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Falah Production.
- Dwijowijito, Nugroho. 2003. Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Frank, Gerald, Mara. 2015. Handbook Analisis Kebijakan Publik; Teori, Politik dan Metode. Bandung: Nusa Media.
- Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-pokok Administrasi publik dan Implementasinya. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan; Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Katz, Saul. 1992. Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Moekijat. 1995. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : CV Mandar maju.
- Nugroho, Iwan. 2011. Ekowisata dan Pembangunan berkelanjutan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oemar, Hamalik. 2003. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. 2007. Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Yoeti, Oka. 2006. Tours and Travel Marketing. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Parsons, Wayne. 2005. Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pitana, Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.
- Umar, Husein. 2005. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wirawan. 2012. Evaluasi; Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.